

## LITERATURE REVIEW: LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK SEBAGAI PILAR AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN

Clara Maria<sup>1</sup>, Dhinie Aoki<sup>2</sup>, Kasih Ramadhani<sup>3</sup>

[2432500383@student.budiluhur.ac.id](mailto:2432500383@student.budiluhur.ac.id)<sup>1</sup>, [2432500532@student.budiluhur.ac.id](mailto:2432500532@student.budiluhur.ac.id)<sup>2</sup>,

[2432500250@student.budiluhur.ac.id](mailto:2432500250@student.budiluhur.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Budi Luhur

### ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi isu krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis laporan keuangan sektor publik dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui studi literatur terhadap berbagai penelitian, buku, serta regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara konsisten mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat pengawasan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Namun, implementasi SAP masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem informasi keuangan, dan pengendalian internal menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan akuntabilitas dan transparansi sektor publik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan Sektor Publik, Akuntabilitas, Transparansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance.

### ABSTRACT

*Transparency and accountability in public sector financial management are critical issues in achieving good governance in Indonesia. Public sector financial statements serve not only as a form of accountability for the use of public funds but also as a tool for evaluating government performance in delivering effective and efficient public services. This study aims to examine the strategic role of public sector financial statements in supporting government accountability and transparency through a literature review of relevant research, books, and regulations. The findings indicate that the consistent implementation of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) improves the quality of financial information, strengthens public oversight, and builds public trust in government institutions. However, the implementation of SAP still faces challenges, including limited human resources, inadequate technological infrastructure, and resistance to change within the bureaucracy. Therefore, strengthening human resource capacity, digitalizing financial information systems, and improving internal controls are essential steps to support the sustainability of accountability and transparency in Indonesia's public sector.*

**Keywords:** Public Sector Financial Statements, Accountability, Transparency, Government Accounting Standards, Good Governance.

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi sorotan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih telah mendorong tuntutan terhadap keterbukaan informasi keuangan publik. Fenomena ini diperkuat oleh munculnya berbagai kasus penyalahgunaan anggaran dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, pada tahun 2023, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ribuan temuan ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Temuan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menegaskan perlunya sistem pelaporan keuangan sektor publik yang andal, akuntabel, dan transparan.

Laporan keuangan sektor publik memiliki peran strategis dalam menjawab tuntutan tersebut. Tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, laporan ini juga menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Berbeda dengan laporan keuangan sektor privat yang berfokus pada laba, laporan sektor publik menekankan nilai pelayanan dan kebermanfaatn sosial. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan keuangan menjadi wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, lembaga legislatif, serta institusi pengawasan seperti BPK dan KPK.

Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan sektor publik mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang lebih efektif. Laporan yang dihasilkan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menekankan pentingnya laporan keuangan sektor publik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait efektivitas implementasi SAP, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan masih adanya persoalan dalam kepatuhan, keterandalan pencatatan, serta kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *literature review*. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan audit. Fokus kajian diarahkan pada pembahasan mengenai peran laporan keuangan sektor publik dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan topik, meliputi: Artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan tema kajian. Buku akademik yang membahas konsep dan praktik akuntansi sektor publik. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan publik di Indonesia, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.

Untuk memperjelas sumber-sumber yang digunakan dalam kajian pustaka ini, berikut disajikan ringkasan literatur yang telah dianalisis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1.	Khikmah & Purwanto (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,	Menguji pengaruh transparansi,	Kuantitatif, regresi	Ketiga variabel tidak	Menunjukkan bahwa kualitas

		dan Fairness LKPD terhadap Pencegahan Korupsi Pemda	akuntabilitas, dan fairness terhadap pencegahan korupsi	linier berganda	signifikan dalam mencegah korupsi daerah meskipun kualitas LKPD baik	laporan tidak otomatis mencegah korupsi
2.	Wiyana et al. (2023)	Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja	Menganalisis pengaruh transparansi dan akuntansi publik terhadap akuntabilitas	Kuantitatif	Transparansi dan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan	Mendukung kerangka berpikir hubungan variabel
3.	Hakiki et al. (2023)	Transparansi, Akuntabilitas, dan Value for Money atas LAKIP	Menguji konsep <i>value for money</i> dalam laporan akuntabilitas kinerja	Studi kasus	Transparansi dan akuntabilitas mendukung efisiensi anggaran	Menambah perspektif efisiensi fiskal dalam akuntabilitas
4.	Oktavianto (2023)	Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan, dan Kualitas Laporan Keuangan	Menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan dan akuntabilitas	Studi empiris	Kualitas laporan keuangan memediasi hubungan pengawasan dan akuntabilitas	Memperkuat logika hubungan antar variabel dalam model teoritis
5.	Judijanto, Sudarmanto, & Triyantoro (2024)	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik	Melakukan analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi tren, tantangan, dan hasil dalam pelaporan keuangan sektor publik.	Analisis bibliometrik (kuantitatif terhadap literatur ilmiah)	Transparansi berperan penting dalam mengurangi korupsi, meningkatkan integritas dan kepercayaan publik. Identifikasi kesenjangan penelitian seperti kurangnya studi tentang peran perbankan	Menawarkan pemetaan ilmiah yang luas dan arah penelitian masa depan dalam akuntansi sektor publik.

					dan audit internal.	
6.	Rosana & Bharata (2023)	Implementasi SAP Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan	Mengkaji dampak akrualisasi SAP terhadap kualitas penyajian laporan	Kuali-tatif	SAP berbasis akrual meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan	Relevan untuk menilai efektivitas SAP
7.	Lestari & Rahayu (2020)	SAP Berbasis Akrual dan Pengambilan Keputusan	Menganalisis hubungan SAP dengan proses pengambilan keputusan	Studi pustaka	SAP berbasis akrual mendukung keputusan internal pemerintah daerah	Menguatkan dimensi manajerial laporan keuangan
8.	Halawa & Nazah (2023)	Implementasi SAP di Kecamatan Medan Tuntungan	Menilai penerapan SAP terhadap kinerja keuangan	Studi kasus	SAP meningkatkan efektivitas fiskal meski kendala masih ada	Studi lapangan mendukung pembahasan praktik nyata
9.	Wahyudi (2019)	Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual	Menilai variasi implementasi SAP akrual	Studi deskrip-tif	Tingkat akrualisasi belum merata antar instansi	Menyoroti tantangan implementasi SAP

10.	Jati (2019)	Pengaruh SAP Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda	Mengkaji pengaruh langsung SAP terhadap kualitas laporan	Kuantitatif	SAP meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Mendukung hipotesis utama terkait SAP dan kualitas laporan
-----	-------------	--	--	-------------	---	--

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan sektor publik memiliki peran strategis sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Tidak hanya merepresentasikan hasil pengelolaan keuangan, laporan ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan, yang selanjutnya berdampak pada ketepatan kebijakan publik. Penelitian oleh Lestari dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa SAP berbasis akrual meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan internal pemerintah daerah secara lebih terstruktur dan efisien.

Transparansi laporan keuangan tidak hanya penting untuk proses manajerial internal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik. Laporan keuangan yang disusun secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan, sekaligus meningkatkan legitimasi institusi pemerintah. Contohnya dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kota Bengkulu dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan hasil dari penerapan SAP berbasis akrual secara konsisten dan transparan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Studi oleh Nasution et al. (2024) mengungkapkan bahwa penerapan standar ini membawa peningkatan kualitas laporan keuangan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparatur tentang akuntansi berbasis akrual, keterbatasan tenaga ahli, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan Wahyudi (2019), yang menekankan bahwa kualitas implementasi SAP di instansi pemerintah pusat belum merata, sehingga keandalan laporan keuangan masih beragam antar satuan kerja.

Hambatan lain dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan publik antara lain adalah resistensi terhadap perubahan, beban administratif, dan kurangnya integrasi sistem informasi keuangan. Rosana dan Bharata (2023) menyoroti bahwa meskipun SAP telah diterapkan, kualitas penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan budaya kerja birokrasi.

Laporan keuangan sektor publik juga berimplikasi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan hal ini adalah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Opini WTP, misalnya, sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas fiskal. Studi oleh Halawa dan Nazah (2023) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mendorong

efisiensi fiskal serta peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab. Upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan melalui penguatan implementasi SAP, peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi sistem informasi keuangan menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan akuntabilitas publik di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan memperkuat pengawasan publik. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan politik yang mampu memperkuat legitimasi institusi pemerintah.

Laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen utama dalam menjamin pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Laporan yang disusun dengan baik menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, serta adanya resistensi terhadap perubahan di beberapa instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi akuntansi sektor publik, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penerapan SAP berbasis akrual di berbagai tingkat pemerintahan, serta dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Selain itu, studi perbandingan antar daerah dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan juga dapat memberikan masukan penting bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 174-185.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control – integrated framework*. COSO.
- Fuad, K., & Baharani, R. Y. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 985-995.
- Hakiki, M., Indriani, E., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)(Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021). *Journal*

- of Management Accounting, Tax and Production, 1(2), 134-145.
- Halawa, Y., & Nazah, H. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI terhadap Kinerja Keuangan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10310-10317.
- Jati, B. P. (2019). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(2), 223-233.
- Khikmah, S., & Purwanto, B. A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 17(2), 193-209.
- Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI Dalam Pengambilan Keputusan Internal dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(2), 75-86.
- Mahmudi. (2021). Akuntansi sektor publik: edisi revisi. UII Press.
- Oktavianto, M. R. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 994-1001.
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111-112.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23-34.
- Wahyudi, I. (2019). Analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akruaI. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(1), 13-22.
- Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240-250.